Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) *ISSN 2622-3740 (Online)*
Vol 9, No. 2, November 2026: 635-654, DOI: 10.34007/jehss.v9i2.3219

Transformasi Infrastruktur dan Diversifikasi Ekonomi Arab Saudi dalam Kerangka Vision 2030

Infrastructure Transformation and Economic Diversification in Saudi Arabia under Vision 2030

Afina Az-Zahira Fajar* & Arie Kusuma Paksi
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 06 Oktober 2026; Direview: 22 Oktober 2026; Disetujui: 29 Oktober 2026: Dipublish: 23 November 2026

*Coresponding Email: a.azzahira.isip23@mail.umy.ac.id

Abstrak

Saudi Vision 2030 diluncurkan pada 2016 sebagai strategi utama untuk mengurangi ketergantungan minyak dan membangun ekonomi yang terdiversifikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi pembangunan infrastruktur logistik, digital, dan perkotaan serta kontribusinya terhadap ekonomi nonminyak. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumen, penelitian ini menganalisis delapan laporan resmi pemerintah periode 2016–2024 melalui kerangka teori Negara Pembangunan. Untuk mencegah klaim berlebihan, data kuantitatif diklasifikasikan secara ketat sebagai *baseline*, target, proyeksi, atau capaian aktual. Hasil menunjukkan bahwa infrastruktur berfungsi sebagai instrumen intervensi negara yang terkoordinasi, terlihat dari perluasan kapasitas logistik, industri, dan jaringan digital yang disertai efisiensi administrasi. Namun, mega-proyek perkotaan seperti Neom masih dalam tahap konstruksi dan menghadapi risiko pembiayaan. Studi ini menyimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur mengindikasikan kemajuan diversifikasi ekonomi, tetapi bukti yang ada belum cukup untuk menyimpulkan tercapainya kemandirian fiskal sepenuhnya. Secara konseptual, studi ini memperluas kerangka Negara Pembangunan dalam konteks negara rente yang bertransformasi.

Kata Kunci: Vision 2030; Pembangunan Infrastruktur; Diversifikasi Ekonomi; Negara Pembangunan; Arab Saudi.

Abstract

Since its 2016 launch, Saudi Vision 2030 has served as the Kingdom's strategy to reduce oil dependency and build a diversified economy. This study analyzes the integration of logistics, digital, and urban infrastructure and its contribution to the non-oil economy. Employing a qualitative descriptive approach with a document study design, this research analyzes eight official government reports from 2016–2024 through the Developmental State framework. To prevent overclaiming, quantitative data are strictly classified as baseline, targets, projections, or reported actual achievements. The findings indicate that infrastructure functions as a coordinated state intervention instrument, evidenced by the measurable expansion of logistics, industrial capacity, and digital networks associated with administrative efficiency. However, urban mega-projects like Neom remain under construction and face financing risks. The study concludes that infrastructure development indicates progress in economic diversification, but available evidence is insufficient to conclude full fiscal independence. Conceptually, this study expands the Developmental State framework within a transforming rentier state.

Keywords: *Saudi Vision 2030; Infrastructure Development; Economic Diversification; Developmental State; Saudi Arabia.*

How to Cite: Fajar, A.A. & Paksi, A.K. (2026), Transformasi Infrastruktur dan Diversifikasi Ekonomi Arab Saudi dalam Kerangka Vision 2030. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (2): 127-131.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade, narasi ekonomi Arab Saudi hampir seluruhnya didominasi oleh kekayaan hidrokarbon. Sejak penemuan minyak dalam jumlah komersial pada tahun 1938, kerajaan telah bertransformasi dari masyarakat agraris-pastoral menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling berpengaruh di dunia. Namun, ketergantungan yang sangat masif terhadap pendapatan minyak bumi ini menciptakan struktur ekonomi yang oleh para akademisi disebut sebagai Negara Rente (Rentier State). Dalam model ini, stabilitas anggaran negara dan kesejahteraan sosial sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional, sebuah kerentanan yang menjadi sangat nyata pada periode 2014–2016 ketika harga minyak dunia jatuh drastis. Fenomena ini menjadi alarm bagi kepemimpinan kerajaan bahwa model ekonomi lama tidak lagi berkelanjutan di tengah tren transisi energi global. Studi tentang ekonomi Timur Tengah menunjukkan bahwa negara penyewa sering kali mengalami hambatan dalam inovasi domestik karena kemudahan akses terhadap modal minyak (Beblawi, 1987). Menanggapi tantangan eksistensial tersebut, pemerintah Arab Saudi meluncurkan Saudi Vision 2030 pada tahun 2016.

Vision 2030 bukan hanya sekadar rencana diversifikasi ekonomi biasa, melainkan sebuah reorientasi geopolitik dan geoekonomi yang bertujuan untuk memposisikan Arab Saudi sebagai jantung dari dunia Arab dan Islam, kekuatan investasi global, serta pusat logistik yang menghubungkan tiga benua. Dalam kerangka besar ini, sektor infrastruktur ditempatkan sebagai pilar utama dan fondasi bagi seluruh program transformasi lainnya. Infrastruktur tidak lagi dipandang secara sempit sebagai pembangunan fisik, tetapi sebagai prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan sektor industri, meningkatkan daya tarik investasi asing langsung, dan memperkuat posisi tawar Arab Saudi dalam arsitektur perdagangan global. Lebih jauh, pengembangan infrastruktur di bawah Vision 2030 mencakup integrasi antara konektivitas fisik dan digital. Pembangunan pelabuhan dan bandara berskala internasional dirancang untuk bersaing dengan pusat-pusat logistik global lainnya, sementara investasi pada infrastruktur digital 5G bertujuan untuk menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan. Transformasi ini menunjukkan adanya perubahan arah pembangunan dari ekonomi yang bersifat ekstraktif menuju ekonomi yang lebih modern, kompetitif, dan terintegrasi secara global.

Kajian terhadap literatur terdahulu menunjukkan bahwa diskursus mengenai transformasi ekonomi Arab Saudi telah berkembang melalui beberapa perspektif utama. Pendekatan pertama berfokus pada transisi negara rente, yang menonjolkan pergeseran pola ekonomi politik kerajaan dari ketergantungan hidrokarbon menuju kemandirian ekonomi, namun pembahasannya seringkali masih bersifat teoretis umum (Baumann, 2019; Horschig, 2016). Baumann (2019) secara khusus mengkritik teori negara rente konvensional karena mengabaikan faktor internasional, sementara Horschig (2016) menyoroti tantangan budaya dan kelembagaan domestik dalam diversifikasi. Pendekatan kedua, dari sudut pandang manajemen dan teknologi, lebih banyak memotret keberhasilan digitalisasi sebatas pada inovasi organisasi dan adopsi teknologi di sektor swasta maupun pemerintahan (Alnasser et al., 2024). Kajian ini berfokus pada strategi internal organisasi dan adopsi teknologi seperti AI dan IoT, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka kebijakan negara yang lebih luas. Pendekatan ketiga, pada aspek infrastruktur fisik, analisis yang tersedia umumnya terpusat pada alokasi teknis hub logistik atau partisipasi warga dalam pembangunan kota pintar secara terisolasi (Alamoudi et al., 2023; Almalki & Alkahtani, 2022). Almalki dan Alkahtani (2022), misalnya, menggunakan model optimisasi untuk menentukan lokasi hub logistik, sementara Alamoudi et al. (2023) mengembangkan kerangka partisipasi warga untuk kota berkelanjutan, keduanya tanpa membahas sinergi antar-sektor. Di sisi lain, meskipun korelasi antara investasi modal tetap dengan diversifikasi ekonomi telah terbukti secara statistik, literatur tersebut belum membedah bagaimana berbagai lini infrastruktur ini bekerja sebagai satu kesatuan instrumen negara (Guendouz & Ouassaf, 2020).

Meskipun literatur-literatur tersebut telah memberikan gambaran yang luas, terdapat celah penelitian yang signifikan. Mayoritas studi terdahulu masih melihat pembangunan infrastruktur logistik, digital, dan perkotaan sebagai entitas yang terpisah, tanpa melihat sinergi integratifnya sebagai basis material baru bagi kedaulatan ekonomi Arab Saudi. Selain itu, masih jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik mengevaluasi progres pembangunan tersebut dengan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

data terbaru hingga tahun 2024, terutama dalam membuktikan bagaimana integrasi ketiga pilar infrastruktur tersebut secara nyata mampu menciptakan efisiensi fiskal dan penyerapan tenaga kerja nonmigas. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga dimensi infrastruktur yaitu logistik, digital, dan perkotaan dalam satu kerangka analisis kebijakan yang koheren, dengan menggunakan konsep Negara Pembangunan (Developmental State) sebagai lensa teoritis untuk menjelaskan peran aktif negara dalam mengorkestrasi transformasi struktural ini. Berbeda dari studi sebelumnya yang menganalisis sektor secara terpisah, penelitian ini memposisikan integrasi infrastruktur sebagai instrumen kebijakan negara yang terstruktur untuk mencapai diversifikasi ekonomi.

Untuk membedah fenomena ini, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Negara Pembangunan. Konsep ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai investor utama dan perencana strategis yang secara langsung mengintervensi pasar untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks Arab Saudi, kerangka ini membantu menganalisis bagaimana pemerintah mengintegrasikan pembangunan infrastruktur logistik, digital, dan perkotaan, serta bagaimana dokumen kebijakan dan indikator ekonomi yang tersedia menunjukkan kontribusinya terhadap diversifikasi ekonomi nonminyak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ambisi Vision 2030, tetapi juga menganalisis secara kritis peran negara dalam mewujudkannya.

Adapun kedaulatan ekonomi dalam penelitian ini dimaknai sebagai kapasitas negara untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas ekonomi nasionalnya, mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang rentan, serta membangun fondasi ekonomi yang resilien dan berkelanjutan. Sementara itu, posisi geoekonomi merujuk pada keuntungan strategis yang dimiliki suatu negara karena lokasi geografisnya yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh ekonominya dalam rantai pasok dan perdagangan global.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pemerintah Arab Saudi mengintegrasikan pembangunan infrastruktur logistik, digital, dan perkotaan dalam kerangka Vision 2030, serta sejauh mana dokumen kebijakan dan indikator ekonomi yang tersedia menunjukkan kontribusinya terhadap diversifikasi ekonomi nonminyak? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis strategi integrasi infrastruktur yang dijalankan oleh pemerintah Arab Saudi dalam kerangka Vision 2030, serta mengevaluasi sejauh mana bukti dokumenter dan indikator ekonomi yang tersedia menunjukkan kontribusi nyata dari integrasi tersebut terhadap proses diversifikasi ekonomi nonminyak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi kajian ekonomi politik pembangunan, khususnya dalam memahami peran negara pembangunan dalam konteks ekonomi rente yang sedang bertransformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi dokumen (document study) untuk menganalisis transformasi infrastruktur Arab Saudi dalam kerangka Vision 2030. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada interpretasi kebijakan pemerintah, pengaturan kelembagaan, dan inisiatif pembangunan infrastruktur dalam konteks strategi diversifikasi ekonomi negara. Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan, program, dan capaian yang dilaporkan pemerintah terkait tiga pilar infrastruktur: infrastruktur logistik dan industri, infrastruktur digital, serta infrastruktur perkotaan. Analisis terhadap ketiga pilar tersebut dipandu oleh kerangka teori Negara Pembangunan (Developmental State) untuk memahami peran pemerintah dalam perencanaan strategis, mobilisasi investasi, koordinasi kelembagaan, dan pengembangan kapasitas ekonomi produktif (Amsden, 1992; Johnson, 1982; Wade, 1990).

Data dalam penelitian ini bersumber dari delapan dokumen resmi yang diterbitkan antara tahun 2016 hingga 2024. Dokumen tersebut meliputi cetak biru Saudi Vision 2030 (2016), Rencana Pengiriman (Delivery Plan) 2021–2025 untuk Program Pengembangan Industri dan Logistik Nasional (NIDLP), Program Transformasi Nasional (NTP), Dana Investasi Publik (PIF), dan Program Kualitas Hidup (QoLP), serta Laporan Tahunan 2024 dari NIDLP, NTP, dan QoLP.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Dokumen-dokumen tersebut dipilih melalui purposive sampling berdasarkan empat kriteria: relevansi dengan pembangunan infrastruktur, otoritas kelembagaan, cakupan periode 2016–2024, dan keterbandingan lintas sektor. Untuk memastikan analisis yang sistematis, dokumen yang dipilih dikategorikan ke dalam tiga jenis: dokumen kebijakan strategis, laporan kinerja, dan publikasi statistik resmi. Kategorisasi ini memungkinkan peneliti untuk membedakan antara target kebijakan yang bersifat normatif, capaian tingkat program, dan indikator makroekonomi.

Tabel 1. Kerangka Analisis Transformasi Infrastruktur Arab Saudi dalam Kerangka Vision 2030

Dimensi Infrastruktur	Indikator Analisis	Sub-Indikator	Sumber Data	Perspektif Negara Pembangunan
Infrastruktur Logistik	Pengembangan Jaringan Logistik	Pembangunan pusat logistik dan jaringan transportasi	NIDLP *Delivery Plan* 2021–2025; NIDLP *Annual Report* 2024	Perencanaan Strategis
	Konektivitas Transportasi	Integrasi pelabuhan, kereta api, bandara, dan jaringan transportasi	NIDLP *Annual Report* 2024	Koordinasi Kelembagaan
	Kinerja Logistik	Target Indeks Kinerja Logistik dan indikator kapasitas transportasi	NIDLP *Delivery Plan* 2021–2025; NIDLP *Annual Report* 2024	Pengembangan Kapasitas Produktif
Infrastruktur Digital	Konektivitas Digital	Perluasan jaringan *broadband* dan pengembangan jaringan serat optik	NTP *Delivery Plan* 2021–2025; NIDLP *Annual Report* 2024	Perencanaan Infrastruktur Strategis
	Transformasi Digital Industri	Implementasi Industri 4.0 dan *Smart Industry Readiness Index* (SIRI)	NIDLP *Annual Report* 2024	Pengembangan Kapasitas Produktif
	Pemerintahan Digital	Pengembangan *e-government*, kematangan transformasi digital, dan indikator efisiensi administrasi	NTP *Delivery Plan* 2021–2025; NTP *Annual Report* 2024	Koordinasi Kelembagaan
Infrastruktur Perkotaan	Pengembangan Perkotaan	Infrastruktur perkotaan, layanan publik, dan peningkatan kualitas hidup	QoLP *Delivery Plan* 2021–2025; QoLP *Annual Report* 2024	Perencanaan dan Koordinasi Strategis
	Investasi Perkotaan Strategis	Investasi pemerintah dalam pembangunan perkotaan dan megaproyek	PIF *Program Delivery Plan* 2021–2025	Mobilisasi Sumber Daya oleh Negara
	Aktivitas Ekonomi (QoL)	Kontribusi terhadap PDB, ketenagakerjaan, dan investasi non-pemerintah yang dilaporkan dalam sektor QoLP	QoLP *Annual Report* 2024	Strategi Diversifikasi Ekonomi

(Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan dokumen resmi Saudi Vision 2030, NIDLP, NTP, PIF, dan Quality of Life Program. Perspektif Negara Pembangunan diterapkan dengan mempertimbangkan konteks politik-ekonomi negara-negara Teluk dan investasi yang dipimpin negara, sebagaimana dibahas oleh Hertog (2012) dan Young (2024)).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap setiap dokumen, dengan fokus pada bagian yang berkaitan dengan perencanaan strategis, mobilisasi investasi, koordinasi kelembagaan, dan pengembangan kapasitas produktif. Konsep Negara Pembangunan dioperasionalisasikan sebagai lensa untuk menganalisis bagaimana pemerintah Arab Saudi mengarahkan akumulasi modal dan restrukturisasi industri. Dalam kerangka ini, infrastruktur 639ogistic dieksplorasi melalui pengembangan jaringan, konektivitas transportasi, dan kinerja 639ogistic; infrastruktur digital melalui perluasan konektivitas, transformasi digital industri, dan pengembangan e-government; serta infrastruktur perkotaan melalui investasi strategis, pengembangan megaproyek, dan aktivitas ekonomi yang berorientasi kualitas hidup. Untuk memitigasi potensi inkonsistensi, setiap data kuantitatif yang diekstraksi dari dokumen diklasifikasikan secara cermat sebagai kondisi dasar (baseline), target kebijakan, proyeksi ekonomi, atau capaian yang telah direalisasikan. Klasifikasi ini penting untuk mencegah target kebijakan disalahartikan sebagai hasil yang sudah tercapai. Kerangka analisis yang mengoperasionalisasikan dimensi-dimensi tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Analisis data mengikuti model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi, informasi yang diekstraksi dikodekan menggunakan kategori awal yang berasal dari tiga pilar infrastruktur. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema analitis yang lebih luas, seperti konektivitas logistik nasional, modernisasi digital industri, dan ekosistem ekonomi perkotaan. Data yang telah dikodekan kemudian disajikan dalam matriks analitis untuk membandingkan prioritas kebijakan, keterlibatan kelembagaan, dan kemajuan yang dilaporkan di ketiga sektor. Tahap terakhir melibatkan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola dan keterkaitan antara intervensi negara dan diversifikasi ekonomi. Untuk memastikan ketelitian analitis dan keterlacakan temuan, seluruh proses dioperasionalisasikan melalui prosedur sepuluh langkah, seperti yang dirinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Prosedur Analitis Langkah demi Langkah

Langkah	Aktivitas	Output
1	Menetapkan fokus penelitian: intervensi negara dalam infrastruktur logistik, digital, dan perkotaan di bawah Vision 2030	Pertanyaan penelitian dan ruang lingkup
2	Memilih delapan dokumen resmi melalui *purposive sampling* menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan	Korpus dokumen
3	Membaca setiap dokumen dan mencatat kebijakan, program, institusi, indikator, halaman sumber, dan periode pelaporan	Log bukti
4	Mengklasifikasikan setiap item kuantitatif sebagai *baseline*, target, proyeksi, atau capaian yang dilaporkan	Indikator terklasifikasi
5	Memberikan kode awal dalam tiga dimensi infrastruktur	Buku kode
6	Mengelompokkan kode terkait ke dalam tema analitis	Daftar tema
7	Mengorganisasikan tema dalam matriks analitis berdasarkan dimensi	Matriks perbandingan
8	Menginterpretasikan setiap tema melalui konsep Negara Pembangunan: perencanaan strategis, mobilisasi sumber daya, koordinasi kelembagaan, kapasitas produktif	Interpretasi teoretis
9	Memverifikasi interpretasi terhadap dokumen sumber dan memisahkan target dari capaian yang direalisasikan	Temuan terverifikasi
10	Membandingkan temuan terverifikasi dengan studi sebelumnya dan menyatakan implikasi teoritis	Kontribusi terhadap literatur

(Sumber: Adaptasi penulis dari Miles et al. (2014))

Sejalan dengan batasan metodologis penelitian ini, analisis difokuskan pada kontribusi yang terindikasi dan keterkaitan. Untuk memastikan keandalan temuan, triangulasi lintas sumber dilakukan dengan membandingkan data dari dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan statistik

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

resmi. Apabila terdapat perbedaan definisi indikator atau satuan pengukuran antar dokumen, hal tersebut dicatat secara eksplisit dan dikontekstualisasikan, bukan diperlakukan sebagai data yang dapat dibandingkan secara langsung. Prosedur ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas analisis dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan mencerminkan bukti dokumenter yang tersedia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagai studi berbasis dokumen, penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder dan tidak menangkap perspektif pembuat kebijakan, pelaksana proyek, atau masyarakat yang terdampak. Kedua, desain penelitian tidak memungkinkan identifikasi hubungan kausal antara pembangunan infrastruktur dan hasil makroekonomi; oleh karena itu, temuan mencerminkan keterkaitan yang terdokumentasi dan kontribusi yang terindikasi, bukan efek kausal yang terbukti. Ketiga, ketergantungan pada laporan pemerintah resmi menimbulkan potensi risiko bias kepentingan dalam pelaporan capaian. Risiko ini dimitigasi dengan membandingkan laporan kinerja dengan publikasi statistik resmi dan literatur akademik. Terakhir, rentang waktu 2016–2024 mencakup fase perencanaan dan implementasi awal Vision 2030, tetapi mungkin belum sepenuhnya mencerminkan dampak jangka panjang dari megaproyek yang sedang berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

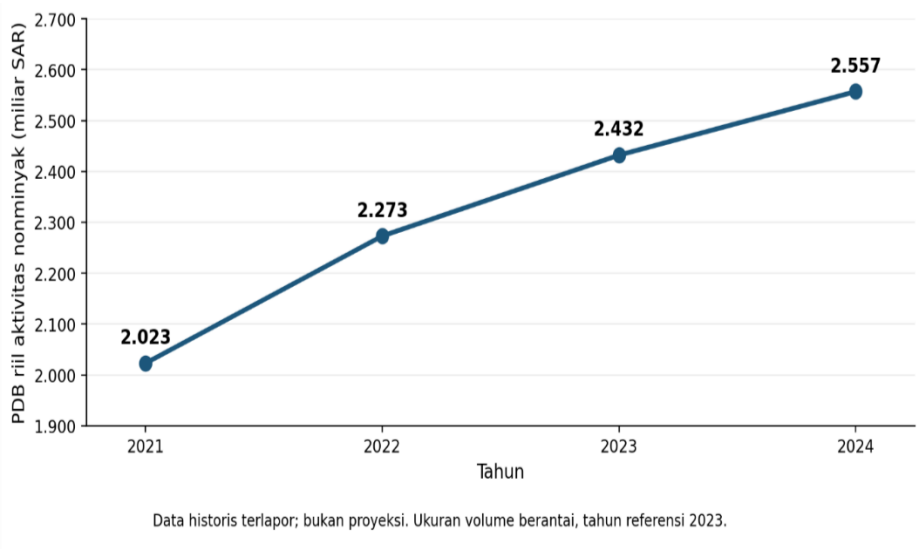
Bagian ini menganalisis transformasi infrastruktur Arab Saudi dalam kerangka Vision 2030 dengan menempatkan negara sebagai aktor yang merencanakan strategi, memobilisasi sumber daya, mengoordinasikan kelembagaan, dan membangun kapasitas produktif. Analisis diorganisasikan ke dalam tiga pilar yang saling terkait, yaitu infrastruktur logistik dan industri, infrastruktur digital, serta mega-proyek perkotaan dan diversifikasi sektor jasa. Ketiga pilar tidak diperlakukan sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang bersama-sama menciptakan kondisi material bagi perluasan aktivitas ekonomi nonminyak. Karena penelitian ini berbasis studi dokumen, pembahasan membedakan secara eksplisit antara kondisi awal (*baseline*), target kebijakan, proyeksi, dan capaian yang dilaporkan dalam dokumen resmi periode 2016–2024. Dengan demikian, temuan tidak dimaksudkan untuk membuktikan hubungan kausal antara pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi, melainkan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan, kontribusi yang terindikasi, serta keterbatasan bukti yang tersedia. Analisis dalam setiap sub bab diarahkan untuk menghasilkan sintesis yang menghubungkan data empiris dengan perspektif Negara Pembangunan dan mencatat sejauh mana klaim mengenai diversifikasi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan efisiensi fiskal dapat didukung oleh bukti dokumenter.

Transformasi Infrastruktur Logistik dan Industri

Transformasi ekonomi Arab Saudi di bawah Vision 2030 berangkat dari persoalan struktural yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Stabilitas anggaran negara dan kesejahteraan sosial bertumpu pada satu komoditas tunggal, yaitu minyak mentah. Ketika harga minyak dunia merosot tajam pada periode 2014 sampai 2016, pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang signifikan dan mulai mengarahkan kebijakan menuju perluasan basis ekonomi di luar sektor minyak. Infrastruktur logistik dan industri ditempatkan sebagai fondasi material bagi perluasan tersebut, dengan asumsi bahwa penyediaan fasilitas produksi, pembiayaan, dan konektivitas perdagangan akan menciptakan kondisi bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi nonminyak.

Indikator makroekonomi pertama yang perlu dianalisis adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil nonminyak. Grafik 1 menyajikan data PDB riil nonminyak Arab Saudi untuk periode 2021 sampai 2024.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0



Grafik 1. Realisasi PDB Riil Non Minyak Arab Saudi, 2021-2024 (SAR Miliar)
(Sumber: National Industrial Development and Logistics Program Annual Report 2024)

Grafik 1 menunjukkan bahwa PDB riil nonminyak meningkat dari SAR 2.023 miliar pada 2021 menjadi SAR 2.557 miliar pada 2024. Data ini diukur dalam harga konstan dengan metode chain-linked volume dan tahun dasar 2023, sehingga mencerminkan pertumbuhan volume aktivitas ekonomi, bukan efek inflasi atau perubahan harga. Pada 2024, sektor nonminyak menyumbang sekitar 55 persen dari total PDB riil Arab Saudi. Angka ini perlu dibaca dalam konteks struktur ekonomi rente yang telah lama terbentuk. Sebagaimana dikemukakan Baumann (2019), besarnya porsi nonminyak dalam PDB tidak secara otomatis menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap penerimaan minyak telah berkurang pada tingkat yang sama. Penerimaan negara masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak global, dan peningkatan PDB nonminyak dapat terjadi bersamaan dengan tetap dominannya minyak sebagai sumber pendapatan pemerintah. Dengan demikian, pertumbuhan PDB non minyak merupakan indikasi perluasan aktivitas ekonomi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa diversifikasi fiskal telah tercapai.

Dalam kerangka Negara Pembangunan, peningkatan PDB nonminyak dapat dipahami sebagai hasil dari kapasitas negara dalam perencanaan strategis. Negara tidak hanya menetapkan target diversifikasi, tetapi juga mengalokasikan sumber daya melalui program seperti NIDLP dan SIDF untuk memastikan bahwa target tersebut memiliki dasar material. Namun, Moreau dan Aligishiev (2024) menegaskan bahwa potensi pertumbuhan nonminyak tidak hanya bergantung pada besarnya investasi, tetapi juga pada reformasi kebijakan yang menyertainya, termasuk kebijakan fiskal, pasar tenaga kerja, dan efisiensi sektor publik. Data PDB nonminyak menunjukkan arah pergerakan, tetapi belum dapat menilai efektivitas intervensi negara secara keseluruhan.

Untuk memahami cakupan sektor nonminyak, perlu didefinisikan secara operasional bahwa sektor ini mencakup seluruh aktivitas ekonomi di luar produksi minyak mentah dan gas alam. Berdasarkan klasifikasi yang digunakan oleh General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, cakupan tersebut meliputi pertambangan nonminyak, manufaktur nonminyak, listrik, konstruksi, perdagangan grosir dan eceran, transportasi dan pergudangan, jasa keuangan, serta jasa pemerintahan. Definisi ini penting karena perbedaan cakupan dapat menghasilkan angka yang berbeda. Sebagai contoh, nilai tambah dari kilang minyak dan petrokimia terkadang dikategorikan sebagai manufaktur, meskipun bahan bakunya berasal dari minyak. Dalam penelitian ini, klasifikasi mengikuti kerangka yang digunakan oleh NIDLP dan GASTAT, dengan penekanan pada aktivitas yang secara struktural tidak bergantung pada ekspor minyak mentah.

Perluasan kapasitas industri menjadi tulang punggung dari strategi diversifikasi. Tabel 3 merangkum perkembangan indikator infrastruktur industri utama dari tahun 2016 hingga 2024.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Tabel 3. Transformasi Infrastruktur Industri Arab Saudi (2016–2024).

Indikator Infrastruktur	2016	2024	Perubahan Absolut	Perubahan (%)	Status	Sumber
Total Fasilitas Industri	7.206	12.589	+5.383	+74,7%	Capaian	NIDLP AR 2024, hlm. 30
Pabrik Siap Pakai (*Ready-Built Factories*)	489	1.511	+1.022	+209%	Capaian	NIDLP AR 2024, hlm. 30
Kredit Bersih SIDF (SAR Miliar)	107	198	+91	+85%	Capaian	NIDLP AR 2024, hlm. 30
Kapasitas Pemrosesan Gas (BSCFD)	15,95	21,5	+5,55	+34,8%	Capaian	NIDLP AR 2024, hlm. 30
Nilai Proyeksi Sumber Daya Mineral (SAR Triliun)	4,9	9,4	+4,5	+91,8%	Estimasi	NIDLP AR 2024, hlm. 30
Kapasitas Energi Terbarukan Terhubung Grid (GW)	0	6,6	+6,6	Baru	Capaian	NIDLP AR 2024, hlm. 30

(Sumber: Diolah dari National Industrial Development and Logistics Program Annual Report 2024)

Tabel 3 memperlihatkan perluasan yang signifikan pada kapasitas fisik dan finansial industri. Peningkatan jumlah pabrik siap pakai sebesar 209 persen, dari 489 unit pada 2016 menjadi 1.511 unit pada 2024, merupakan indikator paling mencolok. Pabrik siap pakai adalah fasilitas produksi yang telah dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti listrik, air, akses jalan, dan bangunan, sehingga investor dapat langsung memulai operasi tanpa harus membangun dari nol. Penyediaan fasilitas seperti ini merupakan bentuk intervensi negara yang khas dalam kerangka Negara Pembangunan. Negara tidak hanya menyediakan iklim investasi yang kondusif, tetapi secara aktif menurunkan biaya masuk dan mempercepat proses industrialisasi dengan menyediakan prasyarat produksi (Amsden, 1992). Peningkatan total fasilitas industri sebesar 74,7 persen, dari 7.206 menjadi 12.589 unit, menunjukkan bahwa strategi ini tidak terbatas pada segmen tertentu, melainkan mencakup spektrum yang lebih luas dari sektor manufaktur.

Dari sisi pembiayaan, kredit bersih yang disalurkan oleh Saudi Industrial Development Fund (SIDF) meningkat sebesar 85 persen, dari SAR 107 miliar pada 2016 menjadi SAR 198 miliar pada 2024. SIDF adalah lembaga keuangan milik pemerintah yang memberikan pinjaman jangka menengah dan panjang kepada industri manufaktur dengan suku bunga di bawah pasar. Peningkatan portofolio kredit SIDF mencerminkan pergeseran peran negara dari sekadar distributor royalti minyak menjadi pemodal utama dan penjamin risiko bagi sektor industri. Johnson (1982) berargumen bahwa negara pembangunan yang efektif tidak hanya mengarahkan investasi melalui kebijakan fiskal, tetapi juga menyediakan instrumen keuangan yang memungkinkan sektor swasta tumbuh tanpa harus menanggung seluruh risiko investasi. Namun, besarnya kredit yang disalurkan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kredit tersebut digunakan secara produktif. Tingkat pengembalian dan dampak terhadap produktivitas industri memerlukan data tambahan yang tidak tersedia dalam laporan ini.

Peningkatan kapasitas pemrosesan gas dari 15,95 menjadi 21,5 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) merupakan faktor pendukung yang krusial. Gas alam adalah bahan baku utama bagi industri petrokimia dan manufaktur intensif energi, dan ketersediaan gas yang murah serta stabil merupakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh negara lain. Dalam perspektif Negara Pembangunan, penyediaan energi bersubsidi bagi industri merupakan bentuk intervensi negara yang dirancang untuk menciptakan keunggulan komparatif di sektor manufaktur (Wade, 1990). Sementara itu, nilai proyeksi sumber daya mineral meningkat dari SAR 4,9 triliun menjadi SAR 9,4 triliun, dan kapasitas energi terbarukan yang terhubung ke grid tumbuh dari nol menjadi 6,6 GW. Kedua indikator terakhir ini perlu diperlakukan secara berbeda. Nilai sumber daya mineral adalah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

estimasi potensi geologis, bukan pendapatan riil, sehingga tidak dapat disamakan dengan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Kapasitas energi terbarukan, di sisi lain, merupakan kapasitas terpasang yang telah terhubung ke jaringan, tetapi laporan tidak merinci berapa banyak energi yang benar-benar dihasilkan dan digunakan oleh sektor industri. Dengan demikian, Tabel 3 secara keseluruhan menunjukkan perluasan kapasitas, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan tingkat pemanfaatan dan produktivitas dari kapasitas tersebut.

Infrastruktur industri mempengaruhi diversifikasi ekonomi melalui mekanisme yang dapat ditelusuri. Pertama, penyediaan pabrik siap pakai menurunkan biaya masuk investasi. Investor tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk membangun fasilitas dasar, sehingga risiko investasi berkurang dan alokasi modal dapat diarahkan ke aktivitas produksi. Kedua, peningkatan kapasitas pemrosesan gas memastikan ketersediaan bahan baku energi yang kompetitif, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas produksi industri petrokimia dan manufaktur. Ketiga, penyaluran kredit SIDF memperkuat rantai pasok dengan memungkinkan industri kecil dan menengah mengakses pembiayaan yang selama ini sulit dijangkau. Keempat, peningkatan jumlah fasilitas industri secara agregat berkontribusi pada peningkatan ekspor nonminyak. Data NIDLP Annual Report 2024 menunjukkan bahwa total ekspor nonminyak mencapai SAR 514 miliar pada 2024, tumbuh 13,2 persen dari tahun sebelumnya. Rinciannya mencakup ekspor komoditas nonminyak sebesar SAR 217 miliar, re-ekspor SAR 91 miliar, dan ekspor jasa SAR 207 miliar (National Industrial Development and Logistics Program, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa perluasan kapasitas industri dan logistik berjalan seiring dengan peningkatan nilai ekspor di luar minyak, meskipun besaran kontribusi masing-masing sektor terhadap total ekspor tersebut memerlukan data yang lebih terdisagregasi. Dengan demikian, infrastruktur industri tidak secara langsung menyebabkan diversifikasi ekonomi, tetapi menciptakan kondisi material yang memungkinkan diversifikasi tersebut terjadi, dan indikator ekspor nonminyak memberikan bukti awal bahwa kondisi tersebut mulai termanifestasi.

Di sisi logistik, negara menargetkan transformasi Arab Saudi menjadi pusat logistik global yang menghubungkan tiga benua. Tabel 4 membandingkan kondisi awal, capaian terbaru yang tersedia, dan target 2030 untuk indikator logistik utama.

Tabel 4. Kondisi Awal, Capaian Terbaru, dan Target 2030 untuk Kapasitas Logistik

Indikator Logistik	Kondisi Awal	Capaian Terbaru (2024)	Target 2030	Status	Sumber
Utilisasi Pelabuhan	50,2% (2019)	64%	66%	Capaian (mendekati target)	NIDLP AR 2024, hlm. 36
Kapasitas Peti Kemas Pelabuhan	8,3 juta TEU (*benchmark*)	7,5 juta kontainer (ditangani)	40 juta TEU	Target	NIDLP AR 2024, hlm. 31
Kapasitas Penumpang Bandara	140,9 juta penumpang (*benchmark* 2025)	>128 juta penumpang	330 juta penumpang	Capaian vs Target	NIDLP AR 2024, hlm. 139
Peringkat *Logistics Performance Index* (LPI)	Peringkat 55 (2023)	Belum dirilis	10 Besar Dunia	Target	NIDLP AR 2024, hlm. 74
Pusat Logistik dengan Potensi Re-ekspor	2 (2019)	23	16	Capaian (melampaui target antara)	NIDLP AR 2024, hlm. 36

(Sumber: Diolah dari National Industrial Development and Logistics Program Annual Report 2024)

Tabel 4 menyajikan gambaran yang lebih bernuansa tentang kemajuan sektor logistik. Utilisasi pelabuhan, yang merupakan ukuran seberapa besar kapasitas pelabuhan yang benar-benar digunakan, telah meningkat dari 50,2 persen pada 2019 menjadi 64 persen pada 2024.

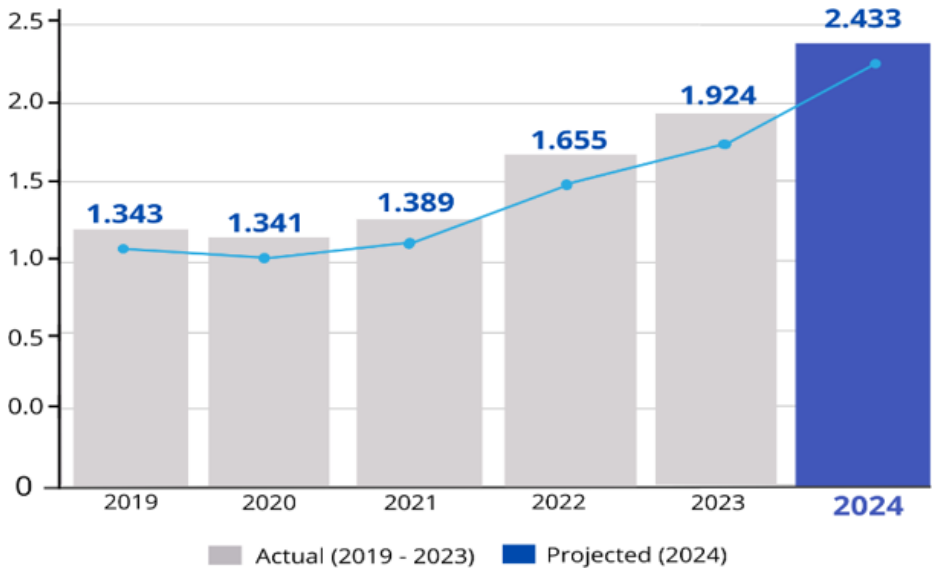
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Angka ini mendekati target antara sebesar 66 persen, tetapi belum mencapainya. Utilisasi pelabuhan adalah indikator yang lebih bermakna daripada kapasitas nominal, karena menunjukkan apakah infrastruktur yang dibangun benar-benar digunakan untuk aktivitas ekonomi. Sementara itu, kapasitas peti kemas pelabuhan masih berupa target 40 juta TEU pada 2030, sementara capaian terbaru menunjukkan 7,5 juta kontainer ditangani pada 2024. Penting untuk dicatat bahwa satuan kontainer tidak sama dengan TEU (Twenty-foot Equivalent Unit), sehingga kedua angka ini tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan satuan ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam menafsirkan data logistik, karena penggunaan satuan yang tidak konsisten dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Untuk kapasitas penumpang bandara, capaian terbaru menunjukkan lebih dari 128 juta penumpang pada 2024, terdiri dari 59 juta penumpang domestik dan 69 juta penumpang internasional, atau sekitar 25 persen di atas level pra-pandemi. Angka ini masih jauh dari target 330 juta penumpang pada 2030, tetapi menunjukkan pemulihan yang kuat setelah pandemi. Sementara itu, jumlah pusat logistik dengan potensi re-ekspor telah mencapai 23 pada 2024, melampaui target antara sebesar 16. Pencapaian ini menunjukkan bahwa perluasan jaringan logistik tidak hanya terjadi pada tingkat kapasitas pelabuhan, tetapi juga pada tingkat simpul distribusi regional. Namun, Bassem (2026) mengemukakan bahwa kontribusi infrastruktur transportasi terhadap investasi asing tidak seragam antar moda. Jaringan jalan dan udara menunjukkan hubungan positif yang lebih kuat dibandingkan infrastruktur maritim. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pusat logistik perlu dievaluasi bersama dengan indikator pemanfaatan dan konektivitas multimoda, bukan hanya dari sisi jumlah.

Peringkat Logistics Performance Index (LPI) merupakan indikator yang paling problematik untuk dianalisis pada tahap ini. Laporan NIDLP menyebut ambisi untuk naik dari peringkat 55 ke 10 besar dunia, tetapi indeks LPI adalah indeks dua tahunan yang belum dirilis untuk periode yang sesuai. Angka peringkat 38 yang muncul di beberapa dokumen merupakan benchmark yang berbeda tahunnya, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim kemajuan atau kemunduran tanpa menyebutkan tahun pengukurannya. Dalam kerangka Negara Pembangunan, penetapan target LPI yang ambisius menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas regulasi dan efisiensi sistem perdagangan (Johnson, 1982). Namun, target tersebut tetap merupakan target, bukan capaian, dan evaluasi terhadapnya harus menunggu data yang tersedia.

Dampak dari ekspansi infrastruktur industri dan logistik terhadap penyerapan tenaga kerja tercermin dalam data ketenagakerjaan yang disajikan pada Grafik 2.



Grafik 2. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor NIDLP, 2019-2024 (dalam juta pekerja)
(Sumber: National Industrial Development and Logistics Program Annual Report 2024, hlm. 28)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Grafik 2 menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor-sektor yang tercakup dalam NIDLP meningkat dari 1,343 juta pada 2019 menjadi 2,433 juta pada 2024. Penting untuk membaca angka ini dengan satuan yang tepat. Angka 1,343 berarti 1,343 juta atau 1.343.000 pekerja, bukan 1.343 orang. Peningkatan terbesar terjadi pada 2024, dengan tambahan lebih dari 508.000 pekerja dibandingkan tahun sebelumnya, dari 1,924 juta pada 2023 menjadi 2,433 juta pada 2024. Data ini adalah jumlah pekerja yang bekerja pada suatu periode, bukan jumlah lapangan kerja baru yang tercipta. Perbedaan ini krusial karena kenaikan jumlah pekerja dapat disebabkan oleh pertumbuhan lapangan kerja baru, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti peningkatan partisipasi angkatan kerja, perubahan definisi survei, atau reklasifikasi sektor.

Dalam kerangka Negara Pembangunan, peningkatan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan intervensi negara dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke sektor-sektor produktif. Namun, hubungan kausal antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja tidak dapat disimpulkan hanya dari data agregat ini. Moreau dan Aligishiev (2024) menegaskan bahwa evaluasi terhadap hasil investasi harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing proyek dan efektivitas implementasinya, bukan hanya besarnya sumber daya yang dialokasikan. Grafik 2 lebih tepat dibaca sebagai indikator arah perluasan aktivitas ekonomi, bukan sebagai bukti kausal bahwa infrastruktur menciptakan lapangan kerja. Rincian lebih lanjut tentang pertumbuhan lapangan kerja pada 2024 berdasarkan sektor ekonomi dan partisipasi tenaga kerja Saudi disajikan pada Table 5.

Table 5. Pertumbuhan Lapangan Kerja di Sektor NIDLP pada 2024 Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Partisipasi Tenaga Kerja Saudi

Kategori	Jumlah Tambahan Pekerja (Orang)	Keterangan
Total Tambahan Pekerja 2024	508.000	Kenaikan dari 1,924 juta (2023) menjadi 2,433 juta (2024)
Industri Pengolahan	273.000	Sektor penyumbang terbesar
Transportasi dan Pergudangan	180.000	Sektor penyumbang terbesar kedua
Pertambangan dan Penggalian	45.000	
Penyediaan Listrik, Gas, Uap, dan Pendingin	8.000	
Pekerja Warga Negara Saudi	81.000	Terdiri dari 42.000 laki-laki dan 39.000 perempuan

(Sumber: Diolah dari National Industrial Development and Logistics Program Annual Report 2024, hlm. 28-29)

Table 5 memperlihatkan bahwa tambahan 508.000 pekerja pada 2024 terutama berasal dari industri pengolahan dengan sekitar 273.000 pekerja, diikuti oleh transportasi dan pergudangan dengan sekitar 180.000 pekerja, pertambangan dan penggalian dengan sekitar 45.000 pekerja, serta penyediaan listrik, gas, uap, dan pendingin udara dengan sekitar 8.000 pekerja. Dari jumlah tersebut, pekerja warga negara Saudi meningkat sebanyak 81.000 orang, terdiri dari sekitar 42.000 laki-laki dan 39.000 perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa perluasan aktivitas ekonomi di sektor-sektor NIDLP juga disertai dengan peningkatan partisipasi tenaga kerja domestik, khususnya perempuan. Namun, peningkatan 81.000 pekerja Saudi tersebut tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai bukti keberhasilan kebijakan Saudization, karena data ini tidak memisahkan dampak kebijakan dari faktor lain seperti pertumbuhan alami angkatan kerja atau perubahan preferensi pasar kerja. Selain itu, jumlah pekerja Saudi yang terserap, yaitu 81.000, masih jauh lebih kecil dibandingkan total tambahan pekerja sebesar 508.000. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut masih sangat bergantung pada tenaga kerja asing.

Dari perspektif Negara Pembangunan, Gambar 1 menunjukkan bahwa negara tidak hanya berhasil memperluas kapasitas produksi, tetapi juga mulai mengarahkan manfaat pertumbuhan tersebut kepada warga negara. Namun, proporsi pekerja Saudi yang masih kecil dalam total tambahan pekerja menunjukkan bahwa proses substitusi tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal masih berlangsung dan belum tuntas. Aziz dan Sarwar (2023) menemukan bahwa hubungan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

antara indikator tata kelola dan pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi tidak selalu positif, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menghasilkan perubahan struktural masih menjadi pertanyaan terbuka. Data ketenagakerjaan pada Grafik 2 dan Gambar 1 memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang arah transformasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan penuh dari strategi diversifikasi.

Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa transformasi infrastruktur logistik dan industri di Arab Saudi telah menghasilkan perluasan kapasitas yang terukur. Perluasan tersebut meliputi peningkatan fasilitas industri, pembiayaan, kapasitas energi, utilisasi pelabuhan, dan penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekspor nonminyak hingga SAR 514 miliar pada 2024. Dalam kerangka Negara Pembangunan, perluasan ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari kapasitas negara dalam empat dimensi. Dimensi pertama adalah perencanaan strategis, yang terlihat dari penetapan target dan prioritas melalui NIDLP dan Vision 2030. Dimensi kedua adalah mobilisasi sumber daya, yang terlihat dari investasi melalui SIDF dan PIF. Dimensi ketiga adalah koordinasi kelembagaan, yang terlihat dari pelibatan berbagai kementerian dan otoritas dalam pelaksanaan program. Dimensi keempat adalah pengembangan kapasitas produktif, yang terlihat dari penyediaan pabrik siap pakai, gas murah, dan jaringan logistik. Namun, data yang tersedia memiliki keterbatasan mendasar. Pertama, sebagian besar data berasal dari laporan mandiri pemerintah, sehingga terdapat potensi bias kepentingan dalam pelaporan capaian. Kedua, data yang tersedia sebagian besar bersifat agregat dan tidak memisahkan dampak intervensi negara dari faktor eksternal seperti harga minyak global, pertumbuhan ekonomi dunia, dan perubahan teknologi. Ketiga, beberapa indikator masih berupa target atau proyeksi, bukan capaian aktual, sehingga evaluasi terhadap keberhasilan strategi diversifikasi belum dapat dilakukan secara definitif. Oleh karena itu, temuan dalam subbab ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi arah transformasi dan kontribusi yang terindikasi, bukan sebagai bukti kausal bahwa pembangunan infrastruktur telah menyebabkan diversifikasi ekonomi.

Transformasi Infrastruktur Digital

Transformasi digital merupakan pilar kedua yang menghubungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan upaya menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan. Jika infrastruktur logistik dan industri memperluas basis material produksi, maka infrastruktur digital berfungsi sebagai saraf yang menghubungkan seluruh komponen ekonomi, mulai dari pabrik hingga layanan pemerintahan. Dalam kerangka Vision 2030, digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai modernisasi teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses layanan, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi. Analisis pada subbab ini disusun dalam tiga tingkatan yang saling berkaitan, yaitu ketersediaan infrastruktur digital, adopsi teknologi oleh industri dan lembaga publik, serta dampak yang terukur pada efisiensi administrasi dan layanan pemerintahan. Pemisahan ketiga tingkatan ini penting karena ketersediaan jaringan merupakan prasyarat, tetapi bukan bukti bahwa teknologi telah digunakan secara produktif atau menghasilkan manfaat ekonomi.

Pada tingkatan pertama, yaitu ketersediaan infrastruktur digital, pemerintah telah melakukan perluasan jaringan secara masif. Laporan NTP Annual Report 2024 mencatat bahwa 99 persen wilayah Arab Saudi telah tercakup oleh jaringan 4G, dan 134 provinsi telah memiliki cakupan 5G (National Transformation Program, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa prasyarat dasar untuk konektivitas telah tersedia di sebagian besar wilayah. Selain itu, lebih dari 780 pabrik di kawasan industri telah terhubung dengan jaringan serat optik, yang memungkinkan transmisi data berkecepatan tinggi bagi aktivitas industri. Dalam kerangka Negara Pembangunan, penyediaan infrastruktur digital oleh negara dapat dipahami sebagai bentuk intervensi yang dirancang untuk menciptakan kondisi bagi modernisasi ekonomi (Johnson, 1982). Negara tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar, tetapi secara aktif membangun jaringan yang memungkinkan sektor swasta dan lembaga publik mengadopsi teknologi. Namun, cakupan jaringan tidak dengan sendirinya menunjukkan kualitas konektivitas, keandalan pasokan listrik, atau tingkat penggunaan aktual oleh pengguna. Oleh karena itu, data cakupan perlu dibaca sebagai indikator kesiapan infrastruktur, bukan sebagai ukuran dampak ekonomi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Pada tingkatan kedua, yaitu adopsi teknologi oleh industri, pemerintah menggunakan Smart Industry Readiness Index (SIRI) untuk mengukur kesiapan pabrik dalam menghadapi Industri 4.0. SIRI dikembangkan oleh International Centre for Industrial Transformation (INCIT) dan diakui oleh World Economic Forum. Kerangka ini mengevaluasi pabrik berdasarkan tiga blok bangunan, delapan pilar, dan enam belas dimensi yang mencakup aspek proses, teknologi, dan organisasi (Arab News, 2022; Saudi Press Agency, 2022). Berdasarkan NIDLP Annual Report 2024 dan publikasi MODON, evaluasi SIRI telah dilakukan dalam beberapa fase. Pada fase awal Agustus 2022, MODON menyelesaikan evaluasi untuk 58 pabrik. Seiring perluasan program, lebih dari 239 pabrik telah dievaluasi dalam siklus berikutnya, dan sebanyak 84 pabrik di antaranya mencapai tingkat kematangan digital yang tinggi berdasarkan kerangka SIRI (Asharq Al-Awsat, 2023; National Industrial Development and Logistics Program, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 35 persen dari total pabrik yang dievaluasi berhasil mencapai tingkat kematangan tinggi. Meskipun demikian, laporan publik tidak merinci skor spesifik untuk masing-masing dari enam belas dimensi SIRI pada 84 pabrik tersebut, karena data tersebut kemungkinan bersifat rahasia perusahaan. Ketiadaan skor per dimensi membuat klaim kematangan digital tinggi perlu dipahami sebagai penilaian agregat program, bukan sebagai hasil audit independen yang dapat dibandingkan antarpabrik. Dalam kerangka Negara Pembangunan, penyediaan kerangka penilaian seperti SIRI dapat dilihat sebagai upaya negara untuk mengarahkan industri menuju standar teknologi tertentu. Namun, keberhasilan adopsi teknologi tidak hanya bergantung pada ketersediaan kerangka penilaian, tetapi juga pada kapasitas perusahaan untuk mengimplementasikan teknologi, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan insentif ekonomi yang memadai (Khan et al., 2026). Oleh karena itu, data 84 pabrik perlu dibaca sebagai indikasi awal adanya adopsi teknologi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh pabrik di Arab Saudi telah bertransformasi secara digital.

Pada tingkatan ketiga, yaitu dampak pada administrasi dan layanan pemerintahan, data yang tersedia lebih terukur dan dapat dilacak. Digitalisasi layanan pemerintahan merupakan salah satu area di mana dampak transformasi digital paling terlihat. Tabel 6 merangkum capaian indikator digitalisasi layanan pemerintahan di Arab Saudi, dengan membandingkan baseline, target 2024, dan capaian aktual 2024.

Tabel 6. Capaian Indikator Digitalisasi Layanan Pemerintahan Arab Saudi

Indikator	Baseline	Target 2024	Capaian 2024	Status	Sumber
Layanan Kementerian Hukum yang Disediakan Secara Elektronik	30% (2015)	80,2%	87,31%	Melampaui target	NTP AR 2024, hlm. 134
Kepuasan Penerima Layanan Peradilan	72% (2018)	83,6%	94,93%	Melampaui target	NTP AR 2024, hlm. 134
Penghematan dari Inisiatif E-Government (SAR Miliar)	0,62 (2019)	2,91	7,8	Melampaui target	NTP AR 2024, hlm. 142
Peringkat E-Government Development Index (EGDI) PBB	44 (2016)	26	6	Melampaui target	NTP AR 2024, hlm. 135
Digital Experience Maturity Index	77,26% (2022)	85%	85,04%	Mencapai target	NTP AR 2024, hlm. 136

(Sumber: Diolah dari National Transformation Program Annual Report 2024)

Tabel 6 menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pemerintahan telah mencapai kemajuan yang signifikan. Persentase layanan Kementerian Hukum yang disediakan secara elektronik meningkat dari 30 persen pada 2015 menjadi 87,31 persen pada 2024, melampaui target 2024 sebesar 80,2 persen. Tingkat kepuasan penerima layanan peradilan juga meningkat dari 72 persen pada 2018 menjadi 94,93 persen, melampaui target 83,6 persen. Peningkatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya memperluas akses layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Penghematan yang dihasilkan dari inisiatif e-government tumbuh dari SAR 0,62 miliar pada 2019 menjadi SAR 7,8 miliar pada 2024, jauh di atas target 2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

sebesar SAR 2,91 miliar. Capaian ini turut mendorong peringkat Arab Saudi dalam E-Government Development Index (EGDI) PBB dari posisi 44 pada 2016 menjadi posisi 6 pada 2024Digital Experience Maturity Index juga mencapai 85,04 persen pada 2024, sedikit di atas target 85 persen.

Namun, perlu dicatat bahwa seluruh angka dalam Tabel 5 adalah laporan mandiri pemerintah dan belum diverifikasi secara independen. Laporan NTP tidak menjelaskan secara rinci metode penghitungan penghematan, sehingga angka SAR 7,8 miliar lebih tepat dimaknai sebagai kinerja yang dilaporkan daripada efisiensi fiskal yang terverifikasi. Selain itu, peningkatan peringkat EGDI tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh layanan pemerintahan telah terdigitalisasi secara merata; peringkat tersebut merupakan indeks agregat yang mengukur ketersediaan layanan online, infrastruktur telekomunikasi, dan kapasitas sumber daya manusia, tetapi tidak mengukur kualitas penggunaan atau dampak ekonomi secara langsung. Dalam kerangka Negara Pembangunan, pencapaian ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari kapasitas negara dalam mengoordinasikan modernisasi institusi melalui digitalisasi. Negara tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga menetapkan target, memantau capaian, dan mengarahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengadopsi teknologi. Namun, efektivitas jangka panjang dari digitalisasi administrasi masih bergantung pada kapasitas institusi untuk mengelola data, melindungi privasi, dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan hanya untuk memenuhi target kuantitatif (Alkorbi & Alrwais, 2025).

Untuk melengkapi gambaran tentang dampak digitalisasi pada layanan pemerintahan, Tabel 7 merangkum capaian kuantitatif dari platform Najiz yang dikelola oleh Kementerian Hukum Arab Saudi pada tahun 2024.

Tabel 7. Capaian Kuantitatif Platform Najiz Kementerian Hukum Arab Saudi pada 2024

Indikator Kinerja	Capaian 2024	Keterangan	Sumber
Transaksi Layanan	> 65 juta	Total transaksi yang diproses melalui platform	NTP AR 2024, hlm. 135
Sidang Pengadilan	> 2,3 juta	Sidang yang difasilitasi secara digital	NTP AR 2024, hlm. 135
Penerima Kuasa Online	> 6 juta	Jumlah pengguna layanan kuasa hukum digital	NTP AR 2024, hlm. 135
Pengurangan Durasi Kasus	86%	Klaim efisiensi waktu penyelesaian perkara	NTP AR 2024, hlm. 135
Jangkauan Layanan	> 100 negara	Penerima manfaat yang tersebar di luar Arab Saudi	NTP AR 2024, hlm. 135

(Sumber: Diolah dari National Transformation Program Annual Report 2024)

Tabel 7 menunjukkan bahwa platform Najiz telah melayani lebih dari 65 juta transaksi layanan, lebih dari 2,3 juta sidang pengadilan, dan lebih dari 6 juta penerima kuasa online pada 2024. Platform ini juga dilaporkan berhasil mengurangi durasi kasus sebesar 86 persen dan menjangkau penerima manfaat di lebih dari 100 negara. Angka-angka ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana digitalisasi telah mengubah cara layanan hukum disediakan, dari proses yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik dan waktu yang lama menjadi layanan yang dapat diakses secara online. Dalam kerangka Negara Pembangunan, keberhasilan platform Najiz menunjukkan bahwa negara tidak hanya menyediakan infrastruktur digital, tetapi juga mereformasi proses bisnis dan prosedur internal untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Namun, perlu dicatat bahwa pengurangan durasi kasus sebesar 86 persen adalah klaim yang dilaporkan oleh program dan belum diverifikasi secara independen. Selain itu, keberhasilan platform Najiz tidak dapat digeneralisasi ke seluruh layanan pemerintahan, karena setiap lembaga memiliki kompleksitas dan tantangan yang berbeda dalam mengadopsi teknologi.

Dari perspektif Negara Pembangunan, transformasi digital di Arab Saudi menunjukkan pola yang konsisten dengan peran negara sebagai pengarah dan koordinator. Negara tidak hanya menyediakan infrastruktur jaringan, tetapi juga menetapkan kerangka penilaian (SIRI), membangun platform layanan (Najiz), dan menetapkan target penghematan. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kapasitas negara untuk menyediakan teknologi,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

tetapi juga pada kapasitas institusi untuk mengelola perubahan, melatih sumber daya manusia, dan memastikan bahwa teknologi digunakan secara inklusif. Alkorbi dan Alrwais (2025) menemukan bahwa transformasi digital pemerintah di Arab Saudi masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kematangan institusi dan hambatan integrasi data antarlembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak dapat diukur hanya dari cakupan jaringan atau jumlah platform yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana data terintegrasi, proses bisnis disederhanakan, dan layanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa transformasi infrastruktur digital di Arab Saudi telah menghasilkan kemajuan yang terukur pada tiga tingkatan. Pada tingkatan infrastruktur, cakupan 4G dan 5G telah diperluas, dan lebih dari 780 pabrik terhubung dengan serat optik. Pada tingkatan adopsi teknologi, 84 dari 239 pabrik yang dievaluasi telah mencapai kematangan digital tinggi berdasarkan kerangka SIRI, meskipun skor per dimensi tidak dipublikasikan. Pada tingkatan dampak administrasi, digitalisasi layanan pemerintahan telah meningkatkan persentase layanan elektronik, kepuasan pengguna, dan penghematan yang dilaporkan, serta mendorong peringkat EGDI Arab Saudi ke posisi 6 dunia. Dalam kerangka Negara Pembangunan, capaian ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari kapasitas negara dalam perencanaan strategis, mobilisasi sumber daya, dan koordinasi kelembagaan. Namun, data yang tersedia memiliki keterbatasan mendasar. Pertama, sebagian besar data merupakan laporan mandiri pemerintah dan belum diverifikasi secara independen. Kedua, data adopsi teknologi industri masih terbatas pada 84 pabrik dan tidak memberikan gambaran tentang sejauh mana teknologi digunakan secara produktif. Ketiga, data dampak administrasi tidak memisahkan pengaruh digitalisasi dari faktor lain seperti reformasi regulasi, perubahan prosedur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, temuan dalam subbab ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi arah transformasi dan kontribusi yang terindikasi, bukan sebagai bukti kausal bahwa infrastruktur digital telah menyebabkan peningkatan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Mega-Proyek Perkotaan dan Diversifikasi Sektor Jasa

Pilar ketiga dari transformasi ekonomi Arab Saudi adalah pengembangan mega-proyek perkotaan dan diversifikasi sektor jasa. Jika infrastruktur logistik dan industri memperkuat basis produksi, dan infrastruktur digital menghubungkan seluruh komponen ekonomi, maka mega-proyek perkotaan dirancang untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang menarik investasi, menyerap tenaga kerja, dan memperluas aktivitas ekonomi di luar sektor minyak. Instrumen utama dari strategi ini adalah Public Investment Fund (PIF), yang berfungsi sebagai kendaraan investasi negara untuk membiayai proyek-proyek berskala besar dan mengembangkan sektor-sektor strategis. Dalam kerangka Negara Pembangunan, peran PIF dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi sumber daya oleh negara untuk menciptakan pasar baru dan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang belum berkembang secara optimal (Johnson, 1982; Wade, 1990).

Namun, analisis terhadap mega-proyek perkotaan menghadapi tantangan metodologis yang khas. Sebagian besar data yang tersedia merupakan proyeksi, target, atau nilai investasi yang direncanakan, bukan capaian aktual yang sudah terealisasi. Oleh karena itu, subbab ini secara eksplisit memisahkan antara proyeksi, target, dan realisasi, serta mengakui keterbatasan bukti yang tersedia. Tabel 8 merangkum perbandingan antara proyeksi dampak ekonomi PIF dan realisasi yang dilaporkan oleh Quality of Life Program (QoLP) pada tahun 2024.

Tabel 8 menunjukkan perbedaan mendasar antara proyeksi PIF dan realisasi QoLP. PIF memproyeksikan kontribusi kumulatif sebesar SAR 1,2 triliun terhadap PDB nonminyak dan penciptaan 1,8 juta lapangan kerja hingga akhir 2025. Angka-angka ini adalah proyeksi dari keseluruhan program PIF, yang mencakup berbagai proyek termasuk Neom, dan tidak dapat diatribusikan secara langsung hanya kepada satu proyek atau satu tahun tertentu. Sebagai perbandingan, QoLP melaporkan kontribusi aktual sebesar SAR 74,5 miliar terhadap PDB pada 2024, melampaui target SAR 73 miliar, dan penyerapan 368.900 tenaga kerja di sektor-sektor yang dicakupnya, atau sekitar 93 persen dari target 395.000 (Quality of Life Program, 2025). Angka QoLP ini adalah realisasi yang dilaporkan untuk tahun 2024, tetapi cakupannya terbatas pada

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

sektor-sektor yang berada di bawah program QoLP, bukan keseluruhan ekonomi nonminyak. Perbedaan cakupan ini penting untuk dicatat agar pembaca tidak membandingkan angka proyeksi PIF dengan realisasi QoLP secara langsung, karena keduanya mengukur hal yang berbeda.

Tabel 8. Perbandingan Proyeksi PIF dan Realisasi QoLP pada 2024

Indikator	Proyeksi PIF (hingga 2025)	Realisasi QoLP (2024)	Status	Sumber
Kontribusi terhadap PDB Non Minyak	SAR 1,2 triliun (kumulatif)	SAR 74,5 miliar (kontribusi QoLP)	Proyeksi vs Realisasi	PIF Delivery Plan 2021-2025; QoLP AR 2024
Penciptaan Lapangan Kerja	1,8 juta pekerjaan (langsung, tidak langsung, induced)	368.900 pekerjaan di sektor QoLP	Proyeksi vs Realisasi	PIF Delivery Plan 2021-2025; QoLP AR 2024
Kontribusi Local Content	60%	39% (kontribusi QoLP)	Proyeksi vs Realisasi	PIF Delivery Plan 2021-2025; QoLP AR 2024
Investasi Non-Pemerintah	SAR 1,2 triliun (kumulatif)	SAR 21,6 miliar (investasi QoLP)	Proyeksi vs Realisasi	PIF Delivery Plan 2021-2025; QoLP AR 2024

(Sumber: Diolah dari Public Investment Fund Program Delivery Plan 2021-2025 dan Quality of Life Program Annual Report 2024)

Proyek Neom merupakan contoh paling menonjol dari mega-proyek perkotaan yang dikelola melalui PIF. Nilai investasi yang direncanakan untuk Neom adalah sebesar USD 500 miliar (Public Investment Fund, 2021). Angka ini adalah nilai proyek yang direncanakan, bukan investasi yang sudah terealisasi. Hingga 2024, Neom masih berada dalam tahap konstruksi dan operasionalisasi awal. Oleh karena itu, dampak ekonominya masih bersifat prospektif dan bergantung pada realisasi investasi, permintaan pasar, serta kemampuan menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai kajian akademik dan lembaga riset telah menyoroti risiko yang menyertai proyek sebesar ini. Algumzi (2022) melalui survei terhadap 417 pakar di Arab Saudi, mengidentifikasi risiko keuangan sebagai salah satu faktor risiko utama dalam proyek Neom, di samping risiko kontraktual dan sumber daya manusia yang dinilai sangat tinggi. Sebuah studi kualitatif oleh Alsheri (2025) juga menemukan adanya kesenjangan tata kelola dalam manajemen risiko dan transparansi keuangan di Neom, meskipun proyek tersebut memiliki tujuan keberlanjutan yang ambisius. Selain itu, laporan Carnegie Endowment for International Peace (2025). mencatat bahwa Neom telah mengalami penundaan jadwal dan pembengkakan biaya, dan bahkan Menteri Keuangan Arab Saudi telah menyuarakan kekhawatiran mengenai kemampuan ekonomi untuk menopang tingkat belanja yang direncanakan. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan negara untuk membiayai proyek-proyek besar tidak cukup untuk menjamin keberhasilan transformasi perkotaan tanpa dukungan institusi, transparansi keuangan, dan mekanisme evaluasi risiko yang memadai. Dalam kerangka Negara Pembangunan, investasi besar di Neom dapat dibaca sebagai upaya negara untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, tetapi keberhasilannya masih memerlukan pembuktian melalui data realisasi yang belum tersedia secara lengkap.

Di sisi lain, sektor jasa yang lebih luas menunjukkan capaian yang lebih terukur. Quality of Life Program melaporkan kontribusi sebesar SAR 74,5 miliar terhadap PDB pada 2024, melampaui target SAR 73 miliar. Program ini juga mencatat penyerapan 368.900 tenaga kerja di sektor-sektor yang dicakupnya, atau sekitar 93 persen dari target 395.000 (Quality of Life Program, 2025). Angka ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, budaya, hiburan, dan olahraga. Namun, angka tersebut adalah jumlah pekerjaan di sektor program, bukan penciptaan lapangan kerja baru secara langsung, dan tidak dapat diklaim sebagai dampak dari Neom. Untuk perumahan, platform Sakani telah meningkatkan akses pembiayaan hipotek, tetapi data yang tersedia tidak secara langsung mengukur keterjangkauan harga rumah atau inklusi sosial secara keseluruhan. Alhamoudi dan K'Akumu (2026) mencatat bahwa kebijakan perumahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

di Arab Saudi cenderung menekankan dukungan sisi permintaan, bukan faktor produksi yang diperlukan untuk mengurangi biaya penyediaan perumahan terjangkau. Oleh karena itu, klaim mengenai keberhasilan Sakani perlu dibatasi pada indikator yang tersedia, yaitu akses pembiayaan, dan tidak diperluas menjadi klaim inklusi sosial secara keseluruhan.

Untuk melengkapi gambaran tentang dampak mega-proyek perkotaan dan diversifikasi sektor jasa terhadap penyerapan tenaga kerja, Tabel 9 merangkum data ketenagakerjaan dari NIDLP dan QoLP.

Tabel 9. Data Ketenagakerjaan dari NIDLP dan QoLP pada 2024

Indikator	Nilai	Satuan	Cakupan	Sumber
Kenaikan Jumlah Pekerja NIDLP 2024	508.000	Pekerja	Sektor NIDLP (industri, logistik, pertambangan, utilitas)	NIDLP AR 2024, hlm. 28
Pekerja Saudi NIDLP 2024	81.000	Pekerja	Terdiri dari 42.000 laki-laki dan 39.000 perempuan	NIDLP AR 2024, hlm. 29
Pekerjaan di Sektor QoLP 2024	368.900	Pekerjaan	Sektor QoLP (pariwisata, budaya, hiburan, olahraga)	QoLP AR 2024, hlm. 38
Target Pekerjaan QoLP 2024	395.000	Pekerjaan	Target program QoLP	QoLP AR 2024, hlm. 38
Kontribusi PDB QoLP 2024	74,5	SAR Miliar	Kontribusi sektor QoLP terhadap PDB	QoLP AR 2024, hlm. 38

(Sumber: Diolah dari National Industrial Development and Logistics Program Annual Report 2024 dan Quality of Life Program Annual Report 2024)

Tabel 9 menunjukkan bahwa data ketenagakerjaan dari NIDLP dan QoLP memiliki cakupan yang berbeda. NIDLP mencatat kenaikan jumlah pekerja sebesar 508.000 pada 2024, yang merupakan selisih jumlah pekerja dari tahun sebelumnya, bukan penciptaan lapangan kerja baru secara langsung. Dari jumlah tersebut, pekerja Saudi meningkat sebanyak 81.000, terdiri dari 42.000 laki-laki dan 39.000 perempuan. Sementara itu, QoLP melaporkan 368.900 pekerjaan di sektor-sektor yang dicakupnya, atau sekitar 93 persen dari target 395.000. Angka QoLP ini adalah jumlah pekerjaan yang ada di sektor program, bukan penciptaan lapangan kerja baru. Perbedaan cakupan dan definisi ini penting untuk dicatat agar pembaca tidak membandingkan angka NIDLP dan QoLP secara langsung, karena keduanya mengukur hal yang berbeda. Selain itu, peningkatan pekerja Saudi sebesar 81.000 tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai bukti keberhasilan kebijakan Saudization, karena data ini tidak memisahkan dampak kebijakan dari faktor lain seperti pertumbuhan alami angkatan kerja atau perubahan preferensi pasar kerja.

Dalam kerangka Negara Pembangunan, data ketenagakerjaan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa negara tidak hanya berhasil memperluas kapasitas produksi, tetapi juga mulai mengarahkan manfaat pertumbuhan tersebut kepada warga negara. Namun, proporsi pekerja Saudi yang masih kecil dalam total tambahan pekerja NIDLP, yaitu 81.000 dari 508.000, menunjukkan bahwa proses substitusi tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal masih berlangsung dan belum tuntas. Aziz dan Sarwar (2023) menemukan bahwa hubungan antara indikator tata kelola dan pertumbuhan ekonomi di Arab Saudi tidak selalu positif, dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menghasilkan perubahan struktural masih menjadi pertanyaan terbuka. Dengan demikian, data ketenagakerjaan dalam subbab ini memberikan gambaran tentang arah transformasi, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan penuh dari strategi diversifikasi.

Secara keseluruhan, bagian ini menunjukkan bahwa mega-proyek perkotaan dan diversifikasi sektor jasa di Arab Saudi telah menghasilkan kemajuan pada tingkat proyeksi dan realisasi yang berbeda. PIF memproyeksikan kontribusi kumulatif SAR 1,2 triliun terhadap PDB nonminyak dan 1,8 juta lapangan kerja hingga 2025, sementara QoLP melaporkan realisasi kontribusi SAR 74,5 miliar terhadap PDB dan 368.900 pekerjaan di sektor-sektornya pada 2024.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Neom, dengan nilai investasi direncanakan USD 500 miliar, masih berada dalam tahap konstruksi dan operasionalisasi awal, sehingga dampak ekonominya masih bersifat prospektif. Berbagai kajian akademik dan lembaga riset telah menyoroti risiko keuangan, tata kelola, penundaan jadwal, dan pembengkakan biaya yang menyertai proyek ini (Algumzi, 2022; Alsheri, 2025; Carnegie Endowment for International Peace, 2025). Dalam kerangka Negara Pembangunan, capaian ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari kapasitas negara dalam mobilisasi sumber daya melalui PIF, perencanaan strategis melalui mega-proyek, dan koordinasi kelembagaan melalui program QoLP. Namun, data yang tersedia memiliki keterbatasan mendasar. Pertama, sebagian besar data PIF adalah proyeksi, bukan realisasi. Kedua, data QoLP mencakup sektor yang terbatas dan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh ekonomi nonminyak. Ketiga, data ketenagakerjaan tidak memisahkan dampak kebijakan dari faktor eksternal, dan tidak memberikan distribusi yang rinci berdasarkan sektor, jenis kelamin, dan kewarganegaraan. Keempat, data perumahan Sakani hanya mengukur akses pembiayaan, bukan keterjangkauan atau inklusi sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, temuan dalam sub bab ini lebih tepat dibaca sebagai indikasi arah transformasi dan kontribusi yang terindikasi, bukan sebagai bukti kausal bahwa mega-proyek perkotaan telah menyebabkan diversifikasi ekonomi secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan bagaimana pemerintah Arab Saudi mengintegrasikan pembangunan infrastruktur logistik, digital, dan perkotaan dalam kerangka Vision 2030, serta sejauh mana dokumen kebijakan dan indikator ekonomi yang tersedia menunjukkan kontribusinya terhadap diversifikasi ekonomi nonminyak. Berdasarkan analisis terhadap delapan dokumen resmi periode 2016–2024, studi ini menemukan bahwa transformasi infrastruktur di Arab Saudi tidak berlangsung sebagai rangkaian proyek yang terpisah, melainkan sebagai intervensi negara yang terkoordinasi melalui perencanaan strategis, mobilisasi sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pengembangan kapasitas produktif. Temuan ini mendukung argumen bahwa kerangka Negara Pembangunan (*Developmental State*) dapat menjelaskan pola intervensi negara dalam ekonomi rente yang sedang bertransformasi. Namun, bukti yang tersedia juga menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi ekonomi masih bersifat terindikasi dan belum sepenuhnya terverifikasi, terutama karena sebagian besar data berasal dari laporan mandiri pemerintah dan belum sepenuhnya memisahkan dampak intervensi negara dari faktor eksternal.

Secara lebih spesifik, ketiga pilar infrastruktur menunjukkan arah perkembangan yang berbeda. Pada pilar logistik dan industri, terdapat perluasan kapasitas fisik, pembiayaan, dan utilisasi pelabuhan yang terukur, serta peningkatan ekspor nonminyak. Pada pilar digital, perluasan cakupan jaringan dan digitalisasi layanan pemerintahan telah menghasilkan efisiensi administrasi yang dilaporkan, meskipun masih terdapat kesenjangan dalam kapasitas institusi dan interoperabilitas data. Sementara itu, pada pilar mega-proyek perkotaan dan diversifikasi sektor jasa, terdapat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang tercakup dalam program, tetapi proyek-proyek berskala besar seperti Neom masih berada dalam tahap konstruksi dan menghadapi risiko pembiayaan serta ketidakpastian permintaan. Dengan demikian, temuan studi ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Arab Saudi telah mencapai kemandirian fiskal atau kedaulatan ekonomi sepenuhnya. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa infrastruktur telah berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang memperluas basis material ekonomi nonminyak, tetapi keberlanjutan dan tingkat kemandiriannya masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa konsep Negara Pembangunan perlu diperluas untuk memahami konteks negara rente yang sedang bertransformasi. Jika literatur klasik tentang Negara Pembangunan menekankan peran negara dalam mendorong industrialisasi dan pertumbuhan produktivitas, studi ini menunjukkan bahwa di Arab Saudi, negara juga berperan sebagai pencipta pasar baru, penjamin risiko investasi, dan koordinator lintas sektor dalam skala yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh kerangka tersebut. Namun, kapasitas negara untuk membiayai proyek-proyek besar tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan transformasi struktural. Oleh karena itu, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu memperkuat mekanisme evaluasi independen terhadap capaian program agar klaim keberhasilan dapat diverifikasi secara objektif dan tidak semata-mata bergantung pada laporan mandiri pemerintah. Kedua, transparansi fiskal dan manajemen risiko proyek-proyek strategis perlu ditingkatkan, terutama untuk mega-proyek yang memiliki ketidakpastian pembiayaan dan permintaan pasar yang tinggi. Ketiga, penguatan kapasitas institusi dan interoperabilitas data perlu menjadi prioritas agar transformasi digital tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur jaringan, tetapi juga menghasilkan pemanfaatan teknologi yang produktif. Keempat, diversifikasi mitra investasi dan sumber pembiayaan perlu dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada belanja negara dan memperluas basis legitimasi ekonomi transformasi. Selain implikasi kebijakan tersebut, studi ini juga menyarankan agenda penelitian lanjutan yang mencakup evaluasi independen terhadap capaian program, analisis komparatif dengan negara-negara Teluk lainnya, serta kajian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang mega-proyek terhadap struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai studi dokumen, analisis ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder dan tidak dapat membuktikan hubungan kausal antara pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi. Selain itu, ketergantungan pada laporan resmi pemerintah menimbulkan potensi bias kepentingan dalam pelaporan capaian. Meskipun demikian, dengan membedakan secara eksplisit antara target, proyeksi, dan capaian yang dilaporkan, studi ini berupaya memberikan gambaran yang seimbang mengenai arah dan batas transformasi infrastruktur Arab Saudi dalam kerangka Vision 2030.

DAFTAR PUSTAKA

Alamoudi, A. K., Abidoye, R. B., & Lam, T. Y. M. (2023). Implementing smart sustainable cities in Saudi Arabia: A framework for citizens' participation towards Saudi Vision 2030. *Sustainability, 15*(8), Article 6648. https://doi.org/10.3390/su15086648

Algumzi, A. (2022). Risks and challenges associated with NEOM project in Saudi Arabia: A marketing perspective. *Journal of Risk and Financial Management, 15*(9), 381. https://doi.org/10.3390/jrfm15090381

Alhamoudi, A. M., & K'Akumu, O. A. (2026). Creating an enabling environment for affordable housing in Saudi Arabia: A critical review of the Kingdom's Vision 2030. *Frontiers in Built Environment, 11*, Article 1730743. https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1730743

Alkorbi, S., & Alrwais, O. (2025). An empirical case study of digital government transformation in Saudi Arabia. *Information, 16*(12), Article 1110. https://doi.org/10.3390/info16121110

Almalki, M., & Alkahtani, M. (2022). Allocation of regional logistics hubs and assessing their contribution to Saudi Arabia's Logistics Performance Index ranking. *Sustainability, 14*(12), Article 7474. https://doi.org/10.3390/su14127474

Alnasser, A., AlGhofaili, A. Y. R., Almushaiti, M. A., & AlZaidan, Z. I. (2024). Navigating digital transformation in alignment with Vision 2030: A review of organizational strategies, innovations, and implications in Saudi Arabia. *Journal of Knowledge Learning and Science Technology, 3*(2), 21–29. https://doi.org/10.60087/jklst.vol3.n2.p29

Alsheri, B. A. (2025). *Sustainability and risk management in Saudi Arabia's giga projects: A case study of NEOM* [Master's thesis, Saudi Digital Library]. https://drepo.sdl.edu.sa/handle/20.500.14154/10

Amsden, A. H. (1992). *Asia's next giant: South Korea and late industrialization*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195076036.001.0001

Arab News. (2022). *MODON completes SIRI evaluation of 58 factories for 4IR readiness*. https://www.arabnews.com/business/modon-completes-siri-evaluation-of-58-factories-for-4ir-readiness-2151836

Asharq Al-Awsat. (2023). *Saudi Arabia's MODON attracts SAR 14.45 bln industrial, logistical investment in 2023*. https://english.aawsat.com/business/4955566-saudi-arabias-modon-attracts-sar1445-bln-industrial-logistical-investment-2023

Aziz, G., & Sarwar, S. (2023). Revisit the role of governance indicators to achieve sustainable economic growth of Saudi Arabia—Pre and post implementation of 2030 Vision. *Structural Change and Economic Dynamics, 66*, 213–227. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.04.008

Bassem, B. S. (2026). Multimodal transport infrastructure and foreign direct investment in Saudi Arabia: An ARDL approach. *Research in Transportation Business & Management, 64*, 101543. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2025.101543

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Baumann, H. (2019). The transformation of Saudi Arabia's rentier state and 'the international'. *Globalizations, 16*(7), 1165–1183. https://doi.org/10.1080/14747731.2019.1573870

Beblawi, H. (1987). The rentier state in the Arab world. In H. Beblawi & G. Luciani (Eds.), *The rentier state* (pp. 49–62). Croom Helm.

Carnegie Endowment for International Peace. (2025). *Vision 2030 in the home stretch: Clear achievements yet limited accountability*. https://carnegieendowment.org/research/2025/03/vision-2030-in-the-home-stretch-clear-achievements-yet-limited-accountability

Guendouz, A. A., & Ouassaf, S. M. (2020). The economic diversification in Saudi Arabia under the Strategic Vision 2030. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 24*(5), 1–23.

Horschig, D. (2016). Economic diversification in Saudi Arabia: The challenges of a rentier state. *Journal of Political Inquiry, 1*, 19–22. http://jpinyu.com/wp-content/uploads/2016/12/Fall2016_Saudi.pdf

Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese miracle: The growth of industrial policy, 1925–1975*. Stanford University Press.

Khan, M. I., Yasmeen, T., Hadi, N. U., Asif, M., Farooq, M., Kurniawan, T. A., Khan, M., & Al-Ghamdi, S. G. (2026). Digital sustainability as an emerging paradigm: Insights from the Saudi Arabian experience and global implications. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 12*(1), Article 100731. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2026.100731

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moreau, F., & Aligishiev, Z. (2024). Diversification insight? A macroeconomic assessment of Saudi Arabia's Vision 2030. *International Economics, 180*, Article 100538. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100538

National Industrial Development and Logistics Program. (2025). *National Industrial Development and Logistics Program annual report 2024*.

National Transformation Program. (2025). *Beyond ambition: The National Transformation Program's achievements annual report 2024*.

Public Investment Fund. (2021). *Public Investment Fund program: Delivery plan (2021–2025)*.

Quality of Life Program. (2025). *Quality of Life Program: Annual report 2024*.

Saudi Press Agency. (2022). *MODON completes SIRI evaluation of 58 factories for 4IR readiness*. https://www.spa.gov.sa/2379623

Saudi Vision 2030. (2016). *Saudi Vision 2030: Kingdom of Saudi Arabia*.

Wade, R. (1990). *Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization*. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctv346sp7

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0